

**GERAKAN KEPANDUAN DI MANGKUNEGARAN 1916-1942: AKHIR
PERSAINGAN JAVAANSCH E PADVINDERS ORGANISATIE (JPO)
DENGAN KRIDA MUDA**

Weda Windiarti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
wedawindi86@gmail.com

Abstrak

Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) merupakan organisasi kepanduan pertama milik pribumi di Indonesia yang didirikan oleh Mangkunegara VII pada tahun 1916 di Solo. Mangkunegaran juga memiliki organisasi kepanduan Krida Muda yang berdiri pada tahun 1934. Kedua organisasi tersebut menyebarluaskan pengaruhnya ke wilayah Mangkunegaran hingga dibubarkan pada awal masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui munculnya kepanduan di Indonesia, mengetahui perbedaan antara JPO dan Krida Muda, dan persaingan antar kedua organisasi serta penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Penelitian ini menghasilkan bahwa berdirinya Krida Muda pada tahun 1934 memicu persaingan antar JPO dan Krida Muda. Kedua organisasi tersebut berebut wilayah untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran. Meskipun masalah tersebut sudah teratasi, demi mencegah konflik diantara keduanya Mangkunegara VII membentuk Hooge Raad dan *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie Commissie* (MNJOC) untuk mengatur dan mengawasi JPO dan Krida Muda. Pada tahun 1939, MNJOC digantikan oleh *Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie* (CB-MNJO).

Kata Kunci: Gerakan, Kepanduan, Mangkunegaran.

Abstract

Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) was the first indigenous scouting organization in Indonesia which was founded by Mangkunegara VII in 1916 in Solo. Mangkunegaran also has a scouting organization Krida Muda which was founded in 1934. Both organizations spread their influence to the Mangkunegaran area until it was dissolved at the beginning of the Japanese occupation in Indonesia in 1942. The purpose of this research is to determine the emergence of scouting in Indonesia, to know the difference of JPO and Krida Muda, and the rivalry between the two organizations and their resolution. This research uses critical history method. This research shows that the establishment of Krida Muda in 1934 triggered competition between JPO and Krida Muda. The two organizations are fighting over territory to spread their influence in the Mangkunegaran region. Although the problem has been resolved, in order to prevent conflict between the two, Mangkunegara VII formed Hooge Raad and *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie Commissie* (MNJOC) to regulate and supervise JPO and Krida Muda. In 1939, MNJOC was replaced by *Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie* (CB-MNJO).

Keywords: Movement, Scouting, Mangkunegaran

PENDAHULUAN

Kepanduan merupakan wadah kegiatan pemuda yang telah ada di Indonesia sejak awal abad 20. Organisasi kepanduan pertama kali lahir di Batavia pada tahun 1912 dengan nama *Nederlandsche Padvinders Organisatie* (NPO) yang didirikan oleh John Smith (Cahyo Budi Utomo, 1995: 126). Organisasi tersebut didirikan untuk mendidik anak-anak orang kulit putih.

Organisasi kepanduan pertama milik pribumi di Indonesia ialah *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO). JPO didirikan di Solo pada tahun 1916 oleh Mangkunegara VII (A.K. Pringgodigdo, 1994: 26). Tujuan dari JPO ialah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak terutama dalam hal pembentukan kepribadian dan ketrampilan olah tubuh agar menjadi penduduk yang berguna. Lahirnya JPO pun telah mendorong munculnya organisasi kepanduan milik pribumi lainnya seperti Hizbul Wathan yang didirikan oleh Muhammadiyah.

Selain JPO, Mangkunegaran juga memiliki organisasi kepanduan lainnya yaitu Krida Muda yang didirikan pada tahun 1934. Krida Muda sendiri berafiliasi dengan organisasi politik lokal *Pakempalan Kawula Mangkunegaran* (PKMN) sehingga sering disebut Krida Muda PKMN. Krida Muda juga mempunyai tujuan untuk membentuk para pemuda di wilayah Mangkunegaran menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi Mangkunegaran.

Kemunculan Krida Muda pada tahun 1934 ini malah menimbulkan konflik antara JPO dan Krida Muda. Perkembangan Krida Muda yang signifikan mendesak perkembangan JPO. Kedua organisasi tersebut terlibat konflik perebutan wilayah pengaruh di wilayah Mangkunegaran. Hal ini pun merupakan pangkal konflik yang terjadi antara JPO dan Krida Muda yang terus berlangsung hingga kedua organisasi itu dibubarkan pada masa awal pendudukan Jepang tahun 1942.

Penelitian ini menjadi penting karena topik yang dibahas dalam penelitian ini unik yaitu mengenai JPO dan Krida Muda yang sama-sama merupakan organisasi kepanduan milik Mangkunegaran yang bersaing satu sama lain memperebutkan wilayah pengaruh di wilayah Mangkunegaran. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan mengenai munculnya gerakan

pandu di Indonesia, perbedaan antara JPO dan Krida Muda, dan persaingan antara JPO dan Krida Muda serta penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah dimaknai sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang autentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (A. Daliman, 2015: 28). Metode sejarah mempunyai empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik yaitu tahap mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan peristiwa sejarah seperti arsip dan majalah. Kedua, kritik sumber yaitu kegiatan menguji sumber-sumber sejarah secara eksternal maupun internal agar memperoleh sumber yang kredibel. Ketiga, interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Keempat, historiografi yaitu penyampaian hasil intrepetasi dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Munculnya Gerakan Kepanduan di Indonesia

Kepanduan di Indonesia muncul pada tahun 1912 saat didirikannya *Nederlandsche Padvinders Organisatie* (NPO) di Indonesia oleh P. John Smith dan Major de Jager. Organisasi tersebut ditujukan untuk anak-anak orang kulit putih dan bertujuan untuk mendidik remaja Nederland-India agar setia terhadap Ratu Belanda, menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi dan menghormati otoritas yang sah, bertanggung jawab, berwibawa, penuh kebaikan dan penolong, dan mencintai alam (Pujo Semedi, dalam Sri Margana dan M. Nursam, 2010: 321). Pada tanggal 4 September 1917, NPO berubah nama menjadi NIPV (*Nederlandsch-Indische Padvinders Vereeniging*) dan keanggotaannya pun semakin terbuka bagi anak-anak pribumi.

Pada tahun 1916 organisasi kepanduan bumi putra untuk pertama kalinya berdiri di Solo dengan nama *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO diprakarsai oleh Mangkunegara VII. Berdirinya JPO memicu lahirnya organisasi kepanduan milik bumi putra lainnya. Para pemimpin pergerakan nasional pun melihat potensi besar kepanduan bagi organisasi dan perjuangan politiknya. Setidaknya terdapat 3 alasan kepanduan mempunyai potensi besar bagi organisasi pergerakan nasional yaitu paham patriotis kepanduan “mendahulukan negara, diri sendiri kemudian” yang sangat cocok dengan pergerakan nasional, sebagai wadah terbaik dalam mendidik anak-anak sejak kecil karena keanggotaan kepanduan terbuka untuk anak-anak usia 8-18 tahun, dan aturan tingkah laku kepanduan yang menghormati dan mematuhi pemimpin pandunya dan juga latar sosio-psikologis kepanduan yang menempatkan pemimpin pandunya sebagai contoh teladan bagi pasukannya merupakan jaminan bagi keberhasilan penyebaran nilai-nilai organisasi induk, misi, dan strategi untuk kader-kader kepanduannya (Pujo Semedi, dalam Sri Margana dan M. Nursam, 2010: 321). Oleh karena itu, kepanduan dapat dijadikan tempat untuk mencetak kader-kader yang setia sejak dari remaja.

Jadi tidak mengherankan bahwa organisasi kepanduan tumbuh subur dalam berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi pergerakan nasional lainnya. Kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta tercatat sebagai tempat yang subur bagi pergerakan kepanduan seperti Muhammadiyah mendirikan *Padvinder Muhammadiyah* pada tahun 1918 dan dua tahun kemudian berubah nama menjadi Hizbul Wathan; Budi Utomo mendirikan *Nationale Padvinderij* (NP) pada tahun 1921; beberapa bulan kemudian *Jong Java* cabang Yogyakarta membentuk *Jong Java Padvinderij* (JJP) dan pada tahun 1928 berubah nama menjadi Pandu Kebangsaan; pada tahun 1923 berdiri *National Padvinders Organisatie* (NPO) sedangkan di Jakarta didirikan *Jong Indonesische Padvinders Organisatie* (JIPO) dan pada tahun 1926 *National Padvinders Organisatie* bergabung dengan *Jong Indonesische Padvinders Organisatie* di Bandung menjadi *Indonesische National Padvinders Organisatie* (INPO); Sarekat Islam mendirikan Wira Tamtama dan pada tahun 1927 berubah nama menjadi *Sarekat Islam Afdeeling Padvinderij* (SIAP); Jong Islamieten Bond mendirikan *Nationale Islamitische Padvinderij*

(Natipij) pada tahun 1926; Pemuda Sumatera juga mempunyai kepanduan yang diberi nama Pandu Pemuda Sumatera (PPS).

Pemerintah kolonial Belanda pun melakukan pengawasan terhadap perkembangan organisasi kepanduan milik bumi putra yang begitu pesat tersebut. Bertambah banyak dan majunya kepanduan yang diurus oleh orang Indonesia, bukan hanya mendesak gerakan kepanduan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tetapi juga semakin menyuburkan perasaan kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda menggunakan NIPV sebagai ujung tombak untuk mengatasi pengaruh kepanduan bumi putra. Pada tanggal 5 April 1926 pengurus NIPV mengundang sejumlah organisasi kepanduan Indonesia, yakni Hizbul Wathan, JPO, NPO, NP, dan INPO (Cahyo Budi Utomo, 1995: 128). Dalam pertemuan yang diadakan di Yogyakarta, NIPV mengajukan gagasan mengenai cara-cara untuk mengangkat derajat kepanduan Indonesia agar sejajar dengan dengan gerakan kepanduan dunia. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut ialah melebur semua organisasi kepanduan ke dalam NIPV (R. Z. Leirissa dkk, 1989: 148). Organisasi kepanduan Indonesia yang hadir menolak gagasan tersebut. Pada tahun 1928 NIPV berusaha kembali untuk menarik organisasi kepanduan Indonesia agar bergabung dengan NIPV. NIPV pun menempuh dengan cara mengubah anggaran dasarnya agar masalah-masalah perasaan kebangsaan dan keagamaan yang menjadi dasar kepanduan nasional dapat tertampung (Ahmaddani G. Martha, dkk., 1985: 71). Namun perubahan tersebut tidak menarik minat para pemuda Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda pun semakin curiga dengan kepanduan pribumi karena mereka tidak mau bergabung dengan NIPV. Pada akhirnya, pemerintah kolonial pun mengambil langkah melarang organisasi kepanduan Indonesia melakukan peringatan hari besar. NIPV pun melarang secara resmi kepanduan Indonesia menggunakan "*padvinders*" dalam nama organisasinya (Cahyo Budi Utomo, 1995: 129). Sebagai reaksi atas larangan itu, Haji Agus Salim mengusulkan pergantian nama *padvinders* menjadi pandu pada tahun 1928.

Dengan semakin banyaknya organisasi kepanduan Indonesia pun menimbulkan kesadaran untuk menyatukan ke dalam satu badan. Upaya pertama

ialah pada pertemuan yang dihadiri oleh Pandu Kebangsaan (PK), INPO, Natipij, SIAP, *Nationale Padvinderij* di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1928 dan menghasilkan terbentuknya Badan Federasi Persatuan Antar Pandu Indonesia (PAPI). Badan Federasi PAPI tidak bertahan lama karena lahirnya organisasi pemuda umum yang berhasil berfusi yaitu Indonesia Muda. Lalu dibentuklah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan fusi beberapa organisasi kepanduan yang memiliki 57 cabang pada tahun 1931 (Suhartono, 1994: 101).

Untuk mewujudkan cita-cita persatuan di kalangan kepanduan Indonesia, pada tanggal 30 April 1938 diadakan konferensi yang dihadiri oleh KBI, SIAP, Natipij dan Hizbul Wathan. Dalam konferensi tersebut menghasilkan keputusan mendirikan satu federasi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) dan selanjutnya diputuskan untuk mengadakan perkemahan umum yang akan mengundang organisasi kepanduan lainnya yang tidak menggabungkan diri dalam federasi ini. Pada bulan Desember 1938 BPPKI pun mengadakan perundingan dengan kepanduan lainnya seperti JPO, Hizbul Wathan, Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Al Wathony dan Truno Kembang untuk membicarakan diadakannya perkemahan umum dan semuanya sepakat dengan usulan tersebut. Usaha mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan Indonesia dalam federasi BPPKI pun terus dilakukan hingga pada bulan Februari 1941, terdapat beberapa organisasi kepanduan yang bergabung seperti Kepanduan Islam Indonesia, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Al Wathony dan Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI). Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia seluruh organisasi dilarang dan dibubarkan termasuk organisasi kepanduan.

B. Gerakan Kepanduan *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO) dan Krida Muda

Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan atas prakarsa Mangkunegara VII pada bulan September tahun 1916 di Solo (Arsip Mangkoenegara VII, *Statuten Javansche Padvinders Organistie*, Bendel No. P180, Tahun 1932). Didirikannya JPO dilatarbelakangi dari kerisauan hati Mangkunegara VII takkala diminta pemerintah Belanda lewat *Nederlands Indische Padvinders*

Vereeniging (NIVP) agar menitahkan *kawula*-nya menjadi anggota (Heri Priyatmoko, 2016: 2). Hal yang ditakutkan oleh Mangkunegara VII jika memenuhi permintaan tersebut ialah anak-anak pribumi akan menjadi kurang intim dengan budaya lokal, setia kepada Ratu Belanda, dan lebih gandrung terhadap negeri yang menjajahnya melalui didikan NIVP.

Tujuan didirikannya JPO ialah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak terutama dalam hal pembentukan kepribadian dan ketrampilan olah tubuh agar menjadi penduduk yang berguna (Wasino, 2008: 354). Untuk mencapai tujuan tersebut, para anggota JPO pun dibimbing dengan cara sebagai berikut (1) mendidik anak-anak dan remaja agar memiliki rasa cinta terhadap tanah tumpah darahnya, (2) memberikan bimbingan agar mereka memiliki rasa cinta dalam melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab, (3) memiliki jiwa ksatria, cinta terhadap sesama hidup, dan suka menolong, (4) mempelajari kehidupan di tanah lapang dengan tujuan membangkitkan rasa cinta terhadap alam, (5) menjalankan kecakapan dengan berbagai cara di dalam dan di luar rumah, permainan, dan cara-cara lainnya, (6) menajamkan sifat rohani, dan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan aturan negara. Para anggota JPO juga harus mengamalkan 13 janji pandu yaitu (1) Pandu selalu dapat dipercaya dan tidak mengecewakan, (2) Pandu selalu menjadi pembela yang lemah dan teraniaya, (3) Pandu selalu sederhana, siap berkorban dan bersahaja hidupnya, (4) Pandu selalu menghargai orang lain dan pendapat orang lain, (5) Pandu selalu menurut perintah pemimpinnya, (6) Pandu selalu tertib, rapi dan beraturan, (7) Pandu selalu menjaga alam, (8) Pandu selalu cinta terhadap tanah airnya, (9) Pandu selalu suci pikiran, perkataan, dan tindakannya, (10) Pandu selalu percaya diri (11) Pandu selalu berwatak ksatria, (12) Pandu selalu cepat dalam mengambil keputusan dan teguh pendiriannya, (13) Pandu selalu senang bekerja.

Dalam struktur organisasinya, pengurus pusat JPO terdiri dari pengurus besar (*Hoofdbestuur*) dan markas besar (*Hoofdkwartier*). *Hoofdbestuur* JPO bertugas untuk memimpin dan membina yang berkaitan dengan organisasi secara umum sedangkan *Hoofdkwartier* JPO bertugas untuk memimpin dan membina hal-hal yang berkaitan dengan kepanduan JPO. Susunan *Hoofdbestuur* JPO terdiri dari

ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, bendahara dan para komisaris. Dalam susunan pengurus *Hoofdkwartier* JPO terdapat beberapa jabatan seperti ATC atau Komisaris Teknis Umum (*Algemeen Technisch Commissaris*) dan para pembantunya yaitu ATC tambahan untuk JPO bagian putri, sekretaris dan para komisaris lainnya. Adapun susunan pengurus cabang JPO terdapat beberapa jabatan yaitu ketua, TC (*Technisch Commissaris*) atau Komisaris Teknis (yang juga menjabat sebagai wakil ketua), sekretaris, bendahara, dan dua orang komisaris.

Setiap cabang JPO ada yang hanya terdiri dari kelompok pandu putra saja dan ada juga yang terdiri dari kelompok pandu putra dan kelompok pandu putri. Untuk mendirikan cabang, JPO mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti minimal sudah ada 25 anak-anak yang bersedia menjadi pandu. Selanjutnya membuat kepengurusannya, terutama harus ada *voorzitter*, *secretaris*, *penningmeester*, dan 2 *commissaris* serta mencari *leider* dan mengumpulkan uang untuk membiayai kegiatan pandu di cabang itu (Josowidagdo, 1936: 1). *Leider* dalam cabang tersebut boleh siapa saja baik guru, penulis, bekas militer atau bekas pandu, setidaknya *leider* tersebut orang yang mengerti sedikit tentang olahraga. Dengan terbentuknya kepengurusan dan adanya *leider*, lantas boleh memulai memimpin anak-anak itu sedikitnya seminggu sekali dan anak-anak boleh memakai pakaian sehari-hari, namun seiring berjalannya waktu harus menggunakan pakaian seragam JPO. Jika hal tersebut sudah dijalankan, maka memberi pemberitahuan kepada Pengurus Pusat JPO di Mangkunegaran untuk nantinya disahkan dan diberi petunjuk. Untuk menjalankan kegiataannya, JPO memperoleh dana subsidi dari pemerintah Mangkunegaran, namun di beberapa cabang JPO ada yang mewajibkan membayar iuran sesuai ketentuan masing-masing cabang.

Dalam penerimaan anggota pengurus organisasi, JPO hanya menerima para *kawula* Mangkunegaran yang sudah dewasa dan bersuku Jawa. Untuk menjadi pengurus JPO tidak harus pernah menjadi pandu, kecuali pengurus yang menjabat sebagai ATC dan TC. Lalu pada sistem keanggotaan pandu JPO hanya terbuka bagi *kawula* Mangkunegaran baik laki-laki maupun perempuan bersuku Jawa yang sudah bersekolah di tingkat 4 (Arsip Mangkoenegara VII, *Gegeran Minangka Tjepenganipoen Padvinders*, Bendel No. P180, Tahun 1920). Sesuai dengan tata

tertib dan peraturan-peraturan formal kepanduan, anggota pandu JPO dibagi menjadi 3 kelompok tingkatan pandu sesuai dengan usianya. Pada pandu putra JPO terdapat 3 tingkatan kelompok pandu yaitu *welp*/pandu anak-anak (untuk usia 8-12 tahun), *verkenner*/pandu pengenalan medan (untuk usia 12-17 tahun), dan *voortrekker*/pandu utama (untuk usia 17 tahun ke atas) (Anonim, 1938:4-8). Lalu pada pandu putri JPO terdapat *kabouter*/pandu kurcaci (untuk usia 8-11 tahun), *padvindster*/pandu puteri (untuk usia 11-18 tahun), dan *pionierster*/pandu perintis (untuk usia 18 tahun ke atas) Anonim, 1938: 4-8). Untuk menjadi anggota kelompok pandu yang lebih senior, maka seorang pandu harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia yang telah mencukupi, dinilai patuh dan hormat kepada pemimpin, serta lulus dalam ujian tingkatan kepanduan.

Sebelum dilantik menjadi anggota pandu JPO, para calon anggota harus mengerti hal-hal dasar kepanduan seperti mengerti aturan kepanduan, salam hormat pandu, dan panggilan kelompok pandu. Hal-hal kepanduan yang dipelajari oleh para pandu putra JPO yaitu membuat macam-macam simpul tali, baris-berbaris, olahraga dan permainan, pentingnya kebersihan dan kesehatan badan, tindakan pertolongan pertama, teknik membalut luka, mengirim dan menerima pesan melalui sandi morse, ketrampilan menabung, membuat kerajinan, mempelajari arah mata angin, menggunakan kompas, membuat dan membaca peta, menunjukkan jalan, jelajah alam, ketrampilan memasak, mengira-ngira ukuran, ketrampilan menebang dan memotong pohon, menyalakan api, dan lain sebagainya. Adapun untuk pandu putri JPO, terdapat kesamaan dengan pandu putra JPO akan tetapi terdapat perbedaan perihal ketrampilan yang dipelajari seperti menjahit, menyulam, membuat pakaian, membersihkan dan menata peralatan makan dan pakaian, membuat minuman teh, merawat bunga, merawat orang sakit dan anak kecil.

Organisasi Krida Muda didirikan oleh PKMN pada tanggal tanggal 11 November 1934 di Mangkunegaran (*Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Latar belakang didirikannya Krida Muda ialah konflik antara *Pakempalan Kawula Surakarta* (PKS) dan *Pakempalan Kawula Mangkunegaran* (PKMN) dimana PKS (sebagai alat politik kasunanan)

mempropagandakan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran dengan tujuan untuk menganeksasi Mangkunegaran dan hal itu pun coba dibendung oleh PKMN dengan menyebarkan pengaruhnya bersama organisasi kepanduannya yaitu Krida Muda.

Tujuan Krida Muda ialah untuk membimbing para warga atau para pemuda Jawa di Praja Mangkunegaran supaya kelak menjadi masyarakat yang baik dan berguna di Praja Mangkunegaran. Semboyan Krida Muda ialah Setia, Sentosa, Utama. Berdasarkan semboyan tersebut, para anggota Krida Muda pun dibimbing untuk memiliki (1) memiliki rasa setia kepada Praja Mangkunegaran serta menyayangi tanah tumpah darahnya, (2) bersedia menjalankan kewajiban agar di masa depan dapat menjadi warga Mangkunegaran yang baik, (3) menjaga kesehatan jasmani dan pikiran serta berolahraga, (4) mengolah kecerdasan panca indera, (5) tidak merasa takut di depan orang banyak, (6) mempelajari berbagai pengetahuan yang tidak bertentangan dengan peraturan negara, (7) mempelajari berbagai seni serta kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan zaman, (8) sebisa mungkin mencintai sesama serta suka memberikan pertolongan, (9) mengerti serta menghargai keindahan (Arsip Mangkoenegara VII, *PKMN Ngawonteken Krida-Moeda Oetawi Kridamoeda P.K.M.N.*, Bendel No. P180, Tahun 1938).

Keanggotaan Krida Muda terbagi menjadi 5 kelompok yaitu pengurus, penasihat, warga biasa, anggota kehormatan, dan penyanggah dana. Sistem keanggotaannya hanya menerima para *kawula* Mangkunegaran baik laki-laki maupun perempuan yang bersuku Jawa dan bertempat tinggal di wilayah Mangkunegaran akan tetapi khusus anggota penyanggah dana boleh berasal dari suku mana saja. Untuk mendaftar menjadi anggota Krida Muda, para *kawula* dapat mendatangi langsung atau mengirim surat kepada Pengurus Organisasi Krida Muda di daerahnya (*Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Apabila di daerahnya tidak terdapat cabang organisasi Krida Muda, maka dapat datang langsung atau mengirim surat kepada pengurus Organisasi Krida Muda yang terdekat dari wilayahnya atau bisa juga langsung kepada pengurus pusat *Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Seluruh anggota organisasi

Krida Muda mempunyai hak suara dalam rapat organisasi dapat mengikuti pelajaran yang terdapat dalam organisasi akan tetapi anggota penyandang dana tidak memiliki hak suara dalam rapat organisasi.

Struktur kepengurusan dalam organisasi Krida Muda mempunyai susunan yang sama, baik di kantor pusat maupun di kantor cabangnya yaitu *Pangarsa* (berjumlah 1), *Panitra* (berjumlah 1), *Hartaka* (berjumlah 1), *Manggala* (berjumlah 1), dan *Panitya* (berjumlah 1) *Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Apabila ingin menambahkan anggota pengurus, maka harus berjumlah ganjil. Seluruh pengurus organisasi Krida Muda baik pusat maupun cabang dipilih setiap 2 tahun sekali. Anggota pengurus organisasi yang sudah habis masa jabatannya akan tetapi masih ingin mengabdikan sebagai anggota pengurus lagi, dapat mengajukan diri agar terpilih kembali.

Pendanaan organisasi Krida Muda didapatkan dari iuran para anggota organisasi, sumbangan dari siapa saja, dan boleh diupayakan dari mana saja dengan ketentuan tidak menyalahi peraturan organisasi dan negara (*Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 3). Sistem pembayaran iuran berbeda-beda nominalnya bagi setiap anggota organisasi Krida Muda. Bagi *Warga Limrah* perkumpulan diwajibkan membayar iuran setiap bulan minimal 1 sen, untuk *Warga Darma* membayar iuran setiap bulan kurang lebih 5 sen dan apabila iuran dibayar langsung sekali (dalam setahun) dikenakan sebesar f 2,50, sementara itu bagi *Warga Moelja* dan *Warga Manggala* tidak diwajibkan membayar iuran akan tetapi dimintai sumbangan (*Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 5). Sepuluh persen dari uang iuran tersebut wajib disetorkan ke Pengurus Pusat organisasi Krida Muda.

Dalam usaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya, organisasi Krida Muda pun membuka kantor cabang di berbagai wilayah Praja Mangkunegaran. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat mendirikan kantor cabang organisasi

Krida Muda yaitu harus mempunyai anggota minimal sebanyak 50 orang dalam 1 kecamatan di wilayah Praja Mangkunegaran. Selanjutnya kantor cabang baru bisa disahkan oleh Pengurus Pusat, apabila anggotanya yang sudah memakai seragam organisasi paling sedikit ada 50% dari jumlah anggota yang terdapat dalam cabang tersebut (*Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 6).

Dalam organisasi Krida Muda, para anggotanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepanduan seperti pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, baris-berbaris, olahraga, permainan, tindakan pertolongan pertama, teknik membalut luka, dan ketrampilan kerajinan tangan. Selain itu, terdapat tuntunan muatan lokal yang diberikan oleh Krida Muda seperti mempelajari Babad Mangkunegaran, Babad Tanah Djawi, dan Babad Donja, karawitan, pedalangan, tari, dan tembang. Krida Muda juga mempunyai sejumlah kegiatan sosial seperti pemberantasan buta huruf, *waosan*, dana belajar, *pralenan*, koperasi, dan lain sebagainya.

Memasuki masa pendudukan Jepang di Indonesia pada bulan Maret 1942, Pemerintah Pendudukan Militer Jepang mengeluarkan keputusan untuk membubarkan semua organisasi pergerakan nasional dan semua organisasi pribumi, tak terkecuali organisasi-organisasi milik pemerintah Mangkunegaran. Pada bulan April 1942 JPO dan Krida Muda dibubarkan (Citrosoma, A. S., 1994: 6).

C. Persaingan *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO) dan Krida Muda serta Penyelesaiannya

Perkembangan Krida Muda yang begitu pesat baik dari segi jumlah anggota maupun jumlah cabang organisasi sehingga perkembangan JPO tidak terlalu signifikan menyebabkan persaingan di antara keduanya. JPO dan Krida Muda berebut wilayah untuk menyebarluaskan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat dari wakil JPO kepada Patih Mangkunegaran mengenai masalah kerukunan antara JPO dan Krida Muda. Dalam surat tersebut, JPO menghendaki Krida Muda untuk menaati tata tertib *kahonderan* yang mana

Krida Muda tidak boleh mendirikan cabang organisasinya di wilayah *kepanewon* yang sudah ada cabang JPO. Krida Muda juga diharuskan menghentikan kegiatannya dalam pendirian cabang organisasinya di wilayah Tasikmadu karena sudah berdiri cabang JPO di wilayah tersebut (Arsip Mangkoenegara VII, *Javaansche Padvinders Organisatie*, No. P. 627, Tahun 1936). Namun kenyataannya, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Krida Muda dan melanjutkan pendirian cabang organisasinya di Tasikmadu. Karena hal tersebut sudah terlanjur terjadi, JPO pun lebih memilih mengalah dan berusaha menjaga kerukunan dengan Krida Muda. Demi mencegah konflik antar keduanya, JPO meminta pemerintah Mangkunegaran untuk membuat aturan yang lebih tegas.

Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kerukunan pertikaian yang terjadi antara JPO dan Krida Muda, mencuatlah wacana untuk menggabungkan JPO dan Krida Muda ke dalam satu wadah organisasi. Hal tersebut pun mendapat tanggapan penolakan dari Patih Mangkunegaran, JPO dan Krida Muda. Patih Mangkunegaran berpendapat bahwa penyatuan kedua organisasi tersebut ke dalam satu organisasi tidak dapat dilakukan karena perbedaan tuntunan yaitu JPO dengan kependuannya dan Krida Muda hanya tuntunan lokal biasa yang mana orang dengan buta aksara dapat diterima sebagai anggota (Arsip Mangkoenegara VII, *Javaansche Padvinders Organisatie*, No. P. 636, Tahun 1937). JPO menambahkan jika kedua organisasi tersebut digabungkan akan membingungkan para pembina dalam memberikan tuntunan karena adanya perbedaan skill/tingkat pendidikan formal antara anggota JPO dengan anggota Krida Muda yang mana ada yang belum bisa baca-tulis dan ada yang lulusan dari MULO atau HIS (Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 637, Tahun 1937). Selain itu, jika penggabungan JPO dan Krida Muda terjadi malah ditakutkan akan mengalami kemunduran.

Sebagaimana alasan diatas, penggabungan JPO dan Krida Muda tidak dapat dilakukan. JPO pun mengusulkan agar membuat suatu badan komisi yang mengawasi JPO dan Krida Muda. Badan komisi tersebut ialah *Hoge Raad* dan *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie Commissie* (MNJOC). Usulan tersebut pun diterima, Mangkunegara VII pun mendirikan *Hoge Raad* tanggal 17 Agustus

1937 dan MNJOC tanggal 28 September 1937. MNJOC ini dapat dikatakan kepanjangan tangan dari *Hoge Raad* dalam hal mengawasi dan mengatur JPO dan Krida Muda. Adapun kewajiban MNJOC ialah (Arsip Mangkoenegara VII, *Javaansche Padvinders Organisatie*, No. P. 636, Tahun 1937).

1. Mengetahui status dan peraturan setiap organisasi kepemudaan. Selanjutnya diperbolehkan untuk mengubah dan mengesahkannya.
2. Berwenang membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi kepemudaan.
3. Komisi selalu mengawasi jalannya semua organisasi kepemudaan.
4. Komisi dapat mengelola keuangan, menerima uang subsidi dari pemerintah dan membagikan uang subsidi tersebut kepada setiap organisasi kepemudaan.
5. Komisi memiliki wewenang untuk menentukan dan merubah rencana kerja 1 tahun kedepan setiap organisasi kepemudaan.
6. Memberikan izin kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi kepemudaan.
7. Selain itu, kalau ada salah satu organisasi kepemudaan yang tidak setuju dengan keputusan komisi, maka boleh mengajukan banding atas putusan tersebut kepada *Hoge Raad*.

Pada tanggal 25 Juni 1939, *Hoge Raad* menyetujui berdirinya *Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie* (CB-MNJO) di Mangkunegaran (Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 618, Tahun 1939). Dengan demikian, MNJOC pun dibubarkan dan digantikan peranannya oleh CB-MNJO. CB-MNJO merupakan suatu badan yang mewakili semua organisasi pemuda di Mangkunegaran yang berada di bawah kepemimpinannya dan bertanggung jawab atas semua perbuatan organisasi-organisasi tersebut. Sebagai wakil dari organisasi pemuda di Mangkunegaran, CB-MNJO bertanggungjawab atas semua perbuatan organisasi-organisasi pemuda yang berada di bawah kepemimpinannya. CB-MNJO juga menjadi badan perantara antara Pemerintah Mangkunegaran dan organisasi-organisasi pemuda di Mangkunegaran (Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd*

Organisatie, No. P. 548, Tahun 1939). Maka dari itu, semua perintah dari pemerintah Mangkunegaran yang ditujukan kepada organisasi-organisasi pemuda harus disampaikan melalui CB-MNJO dan demikian juga semua pengaduan dan permohonan dari organisasi-organisasi pemuda kepada Pemerintah Mangkunegaran (Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 548, Tahun 1939). CB-MNJO juga diperkenankan mengambil keputusan dan tindakan atas nama pemerintah Mangkunegaran.

Adapun kewajiban CB-MNJO ialah memimpin, mengatur, dan mengawasi jalannya semua organisasi pemuda di daerah Mangkunegaran dan yang dipandang sesuai asasnya oleh pemerintah Mangkunegaran, yakni mengenai arah dan tujuannya dalam pendidikan pada umumnya, urusan keuangan yang berhubungan dengan pemerintah, dan semua hal yang mengenai peraturan-peraturan dalam organisasi itu (Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 548, Tahun 1939). Selain itu, CB-MNJO juga mempunyai hak seperti mengunjungi semua rapat yang diadakan oleh organisasi pemuda yang berada di bawah kepemimpinannya, memeriksa keadaan organisasi pemuda tersebut, dan bisa berhubungan langsung dengan *Eere-Voorzitters* dari cabang-cabang organisasi pemuda untuk berunding mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi pemuda tersebut.

KESIMPULAN

Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) dan Krida Muda merupakan organisasi kependuan yang dimiliki oleh Mangkunegaran. Persaingan JPO dan Krida Muda berawal dari terdesaknya perkembangan JPO oleh perkembangan Krida Muda yang signifikan sehingga keduanya pun terlibat perebutan wilayah pengaruh di Mangkunegaran seperti yang terjadi di Tasikmadu. Krida Muda tetap mendirikan cabangnya di Tasikmadu meskipun tidak boleh mendirikan cabang organisasinya di wilayah *kepanewon* yang sudah ada JPO-nya menurut tata tertib *kahonderan*. Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, mencuatlah wacana untuk menggabungkan JPO dan Krida Muda ke dalam satu wadah

organisasi. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terkendala dengan perbedaan tuntunan antara JPO dan Krida Muda dan tingkat pendidikan anggotanya. Demi mencegah konflik di masa mendatang, Mangkunegara VII pun mendirikan *Hoge Raad* tanggal 17 Agustus 1937 dan MNJOC tanggal 28 September 1937. *Hoge Raad* dan MNJOC mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi JPO dan Krida Muda. Pada tanggal 25 Juni 1939, *Hoge Raad* menyetujui berdirinya *Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie* (CB-MNJO) yang menggantikan MNJOC. Adapun CB-MNJO mempunyai wewenang yang lebih luas daripada MNJOC yaitu menjadi pemimpin/wakil dari organisasi pemuda di Mangkunegaran dan badan perantara antara Pemerintah Mangkunegaran dan organisasi-organisasi pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Arsip Mangkoenegara VII, *Gegeran Minangka Tjepenganipoen Padvinders*, No. P180, Tahun 1920.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Statuten Javansche Padvinders Organistie*, Bendel No. P180, Tahun 1932.
- Arsip Mangkoenegara VII, *PKMN Ngawonteken Krida-Moeda Oetawi Kridamoeda P.K.M.N.*, Bendel No. P180, Tahun 1938.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 548, Tahun 1939.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 618, Tahun 1939.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Javaansche Padvinders Organisatie*, No. P. 627, Tahun 1936.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Javaansche Padvinders Organisatie*, No. P. 636, Tahun 1937.
- Arsip Mangkoenegara VII, *Mangkunagaransche Jeugd Organisatie*, No. P. 637, Tahun 1937.
- Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo* tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran.

Buku-buku dan Artikel

Ahmaddani G. Martha, dkk., *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Kurnia Esa, 1985.

A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1994.

Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Citrosoma, A. S., *Oesaha dan Djasa Sri Mangkunegoro VII Terhadap Pendidikan dan Pengajaran*, Artikel tidak diterbitkan, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, 1994.

A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Heri Priyatmoko, “Menempa Bocah Mangkunegaran: Studi Historis Kepanduan Anak Jawa”, Makalah Seminar Dies ke-23 Fakultas Sastra USD, 26 April 2016.

Pujo Semedi HY, “Padvinders, Pandu, Pramuka: Pemuda dan Negara di Indonesia Abad ke 20” dalam Margana, Sri and M. Nursam (eds) *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.

R. Z. Leirissa dkk, *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra : Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: Lkis, 2008.

Majalah

Anonim, “Kabouter, Padvindster”, dalam *Kepandoean* No. 3 dan 4, Tahun III, Maret-April 1938.

Anonim, “Welp, Verkenners”, dalam *Kepandoean* No. 1 dan 2, Tahun III, Januari-Februari 1938.